

Optimalisasi Monitoring dan Evaluasi dalam Percepatan Pensertipikatan Tanah di Pulau Nusakambangan

Rizal Afif Kurniawan. - CILACAP.INFORMAN.ID

Jun 29, 2024 - 12:15



CILACAP, INFO_PAS - Menindaklanjuti hasil kesepakatan dari Focus Group Discussion (FGD) yang diadakan di Pulau Nusakambangan pada tanggal 5 hingga 7 Juni 2024, dilaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Percepatan Pensertipikatan Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah di Pulau Nusakambangan pada Sabtu (29/06/24).

Monitoring dan evaluasi ini diadakan di Aula Wismasari Lapas Batu Nusakambangan dan dihadiri oleh Kepala Biro BMN Kemenkumham, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) se-Nusakambangan, perwakilan dari setiap UPT, serta berbagai instansi terkait. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memastikan bahwa proses pensertipikatan BMN berupa tanah dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah disepakati dalam FGD.

Kepala Biro BMN Kemenkumham, Bapak Aman Riyadi, membuka acara dengan sambutannya. "Proses pensertipikatan BMN berupa tanah di Nusakambangan adalah langkah penting dalam mengamankan aset negara dan mendukung program pemerintah dalam pengelolaan BMN yang efektif. Oleh karena itu, monitoring dan evaluasi ini sangat diperlukan untuk memastikan bahwa semua langkah yang diambil sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat diselesaikan tepat waktu," ujar beliau.

Dalam sesi diskusi, berbagai pihak memberikan masukan dan solusi atas kendala yang dihadapi. Perwakilan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) juga hadir untuk memberikan penjelasan teknis dan dukungan terhadap proses pensertipikatan.

"Kolaborasi yang baik antara Kemenkumham, BPN, dan pihak terkait lainnya adalah kunci keberhasilan dari program pensertipikatan ini," kata perwakilan BPN.

"Dengan adanya monitoring dan evaluasi ini, kami berharap dapat menemukan solusi atas setiap kendala yang dihadapi sehingga proses pensertipikatan BMN dapat berjalan lancar dan sesuai dengan target," ujar Kalapas Batu.

Kegiatan ini menegaskan komitmen Kemenkumham dan seluruh UPT di Nusakambangan dalam mengelola aset negara dengan baik dan bertanggung jawab. Dengan demikian, aset-aset tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan negara.